

## POLEMIK DESA WISATA BERJO

### Pemdes Dituding Caplok Aset Warga

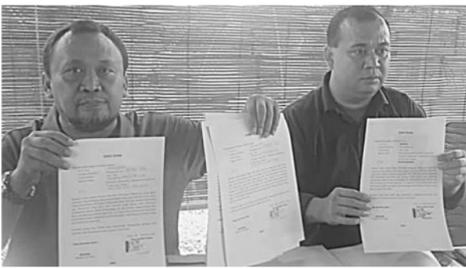
**KARANGANYAR (KR)** - Pemerintah Desa (Pemdes) Berjo, Ngargoyoso ditagih ganti rugi pemakaian jalan umum yang diklaim milik tiga warganya. Tiga warga itu, yakni Cipto Paino, Sidik Tarsono dan Samidi. Mereka meminta ganti rugi berupa jatah kios di objek wisata air terjun Jumog. Hal itu disampaikan kuasa hukum ketiga warga, Kusumo Putra. Ia telah mengirimkan surat somasi ke Pemdes Berjo.

"Pemdes Berjo telah membangun jalan untuk akses menuju air terjun Jumog dari klien kami, tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku," kata Kusumo, Jumat (14/1). Ia berujar kliennya selaku pemilik aset jalan umum itu tak mengimani kesepakatan dengan Pemdes Berjo. Apalagi kliennya tak diberi penggantian sesuai akta otentik. Dulunya, pernah dilakukan rapat desa yang membahas hibah bagi pemilik aset jalan. Saat itu diundang 14 orang pemilik aset.

Sementara itu BUMDes Berjo Ngargoyoso selaku pengelola objek wisata air terjun Jumog membantah tuduhan mencaplok aset lahan warga yang dipakai jalan umum. Tiga warga yang menuding demikian, dinilai salah alamat. Perwakilan dari BUMDes Berjo, Agung Sutrisno mengatakan tiga warga yang meminta jatah kios tersebut tak memiliki wewenang apapun membuat gugatan. Sebab, ketiganya bukan pemilik aset. Agung mengatakan salah satu penggugat itu adalah Sidik Tarsono. Ayah dari Sidik, Cipto Darso, memang memiliki tanah itu.

Ia juga meragukan dasar Cipto Paino sebagai salah satu penggugat. Menurutnya, Cipto bukan siapa-siapa dari semua pemilik lahan yang menghibahkan lahan untuk pembangunan jalan. Ayah Cipto memang punya lahan di sana. Masalahnya sama, lahan itu ternyata bukan atas nama Cipto, melainkan atas nama Warni, saudara Cipto.

Agung Sutrisno kepada wartawan menunjukkan fotokopi berita acara hibah yang ditandatangani para pemilik asli tanah. "Jadi tiga kerabat pemilik tanah yang mengajukan somasi tidak tahu bahwa pemilik aslinya sudah menghibahkan sebagian lahan mereka untuk jalan. Ini buktinya ada semua," ujarnya. (Lim)



KR-Abdul Alim

**Bukti warga Desa Berjo menghibahkan aset menjadikan jalan umum ke Obwis Jumog.**

## PTM di Temanggung Belum 100 Persen

PEMKAB MASIH LAKUKAN KAJIAN

### TEMANGGUNG (KR)

Pembelajaran tatap muka (PTM) di Kabupaten Temanggung belum dilaksanakan 100 persen, meskipun berdasar Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri telah diperkenankan.

Bupati Temanggung Al Khadziq mengatakan masih dipelukan kajian secara mendalam untuk menerapkan PTM 100 persen di Temanggung. Meski begitu kemungkinan besar Temanggung akan diterapkan PTM 100 persen.

Menurut Al Khadziq, PTM 100 persen di Kabupaten Temanggung hanya menunggu waktu yang tepat. "Kami masih mengkaji dan

melihat perkembangan. Kabupaten Temanggung tidak ingin tergesa-gesa," tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, Agus Sujarwo mengatakan banyak pertimbangan untuk dapat melaksanakan PTM 100 persen. "Kami sudah menyampaikan hasil kajian kepada bupati. Namun berdasar kebijakan bupati, PTM belum 100 persen," jelasnya, Sabtu (15/1).

Menurutnya, dalam SKB empat menteri ada persyaratan penerapan protokol kesehatan dengan ketat untuk PTM.

Salah satunya, pelaksana-



KR-Zaini Arrosyid

### Agus Sujarwo

naan wajib menjaga jarak antarbangu minimal satu meter. Juga sudah ditentukan ruang kelas maksimal 8X9 meterpersegi. Kalau ada anak 32 siswa setiap

kelas, maka tidak memungkinkan karena satu ruang paling hanya cukup untuk 20-25 siswa.

"Karena itu, kebijakan yang mungkin kami ambil adalah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas, sambil melihat perkembangan. PTM dengan jarak minimal 1 meter belum ada revisi, sehingga PTM 100 persen belum dilaksanakan di Kabupaten Temanggung," tandas Agus Sujarwo.

Pada Januari 2022 ini, lanjut Agus, PTM di Kabupaten Temanggung masih berlangsung secara terbatas. Berdasarkan SKB empat menteri memang diperkenankan sekolah melak-

sanakan pembelajaran tatap muka 100 persen dengan beberapa kriteria. Antara lain, daerah yang sudah level 1 dan level 2, capaian vaksinasi masyarakat umum 80 persen dan lansia 50 persen termasuk pendidik dan tenaga kependidikan.

Disebutkan, cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2 untuk pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Temanggung sudah lebih 90 persen, anak-anak tingkat SMP juga sudah divaksin semua. Sekarang baru dikejar vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun atau usia SD, yang kini pelaksanaannya sudah mendekati 40 persen. (Osy)

## TKA Sukoharjo Diminta Tidak Pulang ke Negara Asal

**SUKOHARJO (KR)** - Mobilitas tenaga kerja asing (TKA) dan pekerja migran Indonesia (PMI) yang melakukan perjalanan dari luar negeri masuk ke Kabupaten Sukoharjo diawasi ketat. TKA yang sudah bekerja di Sukoharjo juga diminta tidak pulang ke negara asal menjelang libur perayaan Imlek.

Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus korona varian Omicron. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo Agustinus Setiyono, Sabtu (15/1) mengatakan, Disperinaker Sukoharjo sudah mengimbau kepada semua TKA yang sekarang masih bekerja di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk tidak pulang ke negara asal atau kampung halamannya baik untuk posisi saat ini maupun menghadapi libur perayaan Imlek.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus korona varian Omicron. Disperinaker Sukoharjo melakukan antisipasi sejak dini dengan berkoor-

dinasi tempat bekerja TKA di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini sejalan dengan imbauan pemerintah pusat.

Sebab di Indonesia sudah ditemukan kasus penyebaran virus korona varian Omicron dari pelaku perjalanan luar negeri. TKA yang ada diminta tetap tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pihak perusahaan tempat TKA bekerja juga diminta tetap membantu pengawasan terhadap tenaga kerja asingnya. Harapannya para TKA tidak meninggalkan Indonesia dan pulang ke negara asalnya tanpa diketahui pihak perusahaan.

Disperinaker Sukoharjo mencatat ada 50 orang TKA yang secara resmi terdata hingga akhir tahun 2021 lalu bekerja di beberapa perusahaan di Kabupaten Sukoharjo. Angka tersebut relatif kecil. TKA tersebut berasal dari India, Tiongkok dan Korea Selatan. Mereka bekerja di industri besar yang membutuhkan tenaga ahli dari TKA.

"TKA ini terdaftar resmi bekerja di Sukoharjo. Mobilitas mereka keluar atau pergi antar negara pada kondisi sekarang memang menurun. Tapi melihat perkembangan kasus penyebaran virus korona ada varian baru Omicron maka kami imbau TKA tidak pulang ke negara asal dulu," ujarnya.

Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 lalu hingga sekarang membuat mobilitas TKA menurun. Sebab pemerintah pusat sudah melakukan pengetatan pengawasan. Termasuk, masuknya TKA dari luar negeri ke Indonesia.

"TKA dari luar negeri menjadi sulit masuk. Begitu pula TKA yang sudah bekerja di Sukoharjo sulit keluar negeri. Pengetatan dimaksudkan sebagai antisipasi penyebaran virus Corona. Sebab sekarang masih pandemi," lanjutnya.

Disperinaker Sukoharjo juga melakukan pengetatan pengawasan terhadap PMI. Sebab diketahui ada warga asal Kabupaten Sukoharjo bekerja di luar negeri. Mereka diminta tidak pulang ke kampung halamannya lebih dulu sebagai antisipasi penyebaran virus korona varian baru Omicron.

Apabila nanti tetap ada PMI yang pulang kampung dan masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo, Disperinaker Sukoharjo meminta dilakukan pemeriksaan secara ketat oleh pemerintah pusat sejak masuk di bandara. PMI tersebut juga wajib diperiksa kondisi kesehatannya dan melakukan karantina mandiri. (Mam)

# HUKUM

## Polisi Bekuk Pelaku Curat

**BANTUL (KR)** - Tim Opsnal Reskrim Polsek Banguntapan Polres Bantul Polda DIY berhasil membongkar kasus pencurian dengan pemberatan (Curat). Dalam kasus tersebut petugas meringkus seorang tersangka berinisial Ma (25) asal Jalan Kutilang Pondok Sejahtera Kutabaru Tangerang. Kasus yang terjadi di Potoronan Banguntapan Banul itu dalam penanganan penyidik Polsek Banguntapan.

Kanit Reskrim Polsek Banguntapan Polres Bantul Polda DIY, AKP Anar Fuadi SH MIP, kemarin, mengatakan kasus tersebut bermula ketika korban meletakkan dua handphone di lantai kamar kosnya. Selanjutnya korban keluar kamar untuk ke kamar mandi dan membiarkan tanpa terkunci.

Sekitar 20 kemudian menit korban keluar kamar mandi. Namun setelah sam-

pai kamar kosnya dua handphone milik korban beserta uang di dalam dompet Rp 175.000, telah hilang raib. Akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.175.0000.

Mendapat laporan tersebut, AKP Anar Fuadi didampingi Katim Opsnal Polsek Banguntapan Aipda Bowo Setiawan SH MH dengan ditopang penuh Unit Jatanras Krimum Polda DIY di bawah komando Kopol I Wayan Artha, melakukan penyelidikan.

Akhirnya petugas menangkap tersangka di kosnya daerah Kotagede Yogyakarta. Kepada petugas, tersangka mengaku sebelumnya juga mengasak laptop di Gambiran Umbulharjo. "Kami terus mendalami kasus ini. Ternyata ada rentetan kasus selain di wilayah Banguntapan," ujar Anar. (Roy)

## TAK DILENGKAPI SURAT DAN PAKAI KNALPOT BRONG 85 Motor Terjaring Operasi

**TEMANGGUNG (KR)** - Petugas Polres Temanggung mengamankan sebanyak 85 unit sepeda motor karena tidak dilengkapi surat-surat kendaraan dan memakai knalpot tidak standar.

Kapolres Temanggung, AKBP Burhanuddin, mengatakan 85 unit sepeda motor yang diamankan tersebut merupakan hasil operasi jajaran Satlantas

Polres Temanggung dalam satu minggu terakhir. "Pemilik dapat mengambil kendaraan miliknya dengan syarat telah ada putusan pengadilan, menunjukkan surat kendaraan dan mengganti dengan knalpot standar," jelasnya. Burhanuddin menyebutkan operasi difokuskan pada pelanggaran lalulintas penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar atau knalpot brong. Ba-

rang bukti yang amankan dari operasi Senin (10/1) sampai Jumat (14/1) tersebut berupa 34 STNK dan 51 kendaraan bermotor.

Pelanggaran yang dikenakan adalah Pasal 285 ayat 1 jo 106 ayat 3 Pasal 106 ayat 3 jo Pasal 48 ayat 2 dan 3 dengan hukuman 1 bulan dan denda paling banyak 250 ribu.

"Kami berharap warga untuk tertib berlalulintas dengan menggunakan knalpot standar, karena knalpot brong membuat bising atau mengganggu pengendara lain. Surat-surat kendaraan juga harus dilengkapi," harapnya.

Burhanuddin menegaskan penertiban kendaraan knalpot brong akan terus ditegakkan baik pada perseorangan atau kendaraan yang melaju berombongan. "Tidak hanya sepeda motor, mobil pun jika gunakan knalpot tidak sesuai standar juga akan ditindak tegas," tegasnya. (Osy)



KR-Zaini Arrosyid

**Petugas Polres Temanggung menunjuk sepeda motor dan knalpot brong yang diamankan.**

## PELAKU DITANGKAP DI HOTEL

### Ngaku Petugas Dinsos, Tipu Pencari Kerja

**MAGELANG (KR)** - Diduga melakukan tindak pidana penipuan, AM (50) warga Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang ditangkap tim gabungan Polsek Mungkid dan Satreskrim Polres Magelang.

Tersangka ini juga merupakan residivis dalam kasus yang sama yaitu tindak penipuan di wilayah Yogyakarta pada tahun 2017 lalu.

Waka Polres Magelang Kopol Aron Sebastian SIK MSi, Sabtu (15/1), mengungkapkan tersangka sempat meminta beberapa barang kepada korban sebagai barang jaminan.

Dikatakan, saat tersangka melintas di wilayah Desa Pucanganom Kecamatan Srumbung Magelang sempat bertemu dengan ayah korban yang sedang berada di depan rumahnya.

Saat itu AM mengaku petugas dari Dinas Sosial dan bertanya kepada ayah korban apakah memiliki anak yang belum bekerja.

diminta memberesi rumah, karena sekitar pukul 18.00 masker akan datang. Kemudian tersangka pergi.

Sekitar 30 menit kemudian ayah korban pulang dan mencari AM lantaran di Kantor Pos tidak ditemukan brosur seperti yang dimaksud.

Korban bersama kedua orangtuanya sadar kalau mereka telah menjadi korban penipuan dan berusaha mencari tersangka, na-

mun tidak ketemu.

Laporan ke Polsek Srumbung pun dilakukan. Dari kejadian penipuan ini mereka mengalami kerugian sekitar Rp 9 juta.

Tim Unit Reskrim Polsek Srumbung dan Resmob Satreskrim Polres Magelang juga langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. AM berhasil dibekuk saat berada di sebuah hotel yang ada di wilayah Kota Magelang. (Tha)



KR-M Thoha

**Waka Polres Magelang saat bertanya kepada pelaku.**

## PERKARA DUGAAN KORUPSI PD BKK WERU

### Mantan Direktur Jadi Tersangka

**SUKOHARJO (KR)** - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo menetapkan status tersangka pada Suy atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kredit 19 nasabah pada PD BKK Weru Sukoharjo atau sekarang menjadi PT BKK Jateng Cabang Sukoharjo Kantor Kas Weru tahun 2010 sampai 2011. Atas perbuatan mantan Direktur PD BKK Jateng Cabang Sukoharjo tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.383.750.000.

Pelaksana Tugas (Plt) Kajari Sukoharjo, Agita Tri Moertjahjanto, Minggu (16/1), mengatakan tim penyidik tindak pidana khusus Kejari Sukoharjo pada Kamis (13/1) menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kred-

it 19 nasabah pada PD BKK Weru Sukoharjo tahun 2010 sampai 2011 yaitu Suy selaku mantan Direktur PD BKK Jateng Cabang Sukoharjo. Penyidikan kasus tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 13 Januari 2022. Suy juga ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan berdasarkan surat Kepala Kejari Sukoharjo tanggal 13 Januari 2022.

Tersangka ditahan di Rutan Polres Sukoharjo selama 20 hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2022. Alasan dilakukan penahanan rutan karena penyidik khawatir para tersangka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Dalam proses penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi, 2 saksi ahli dan diperoleh LHP penghitungan kerugian negara yang merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp 1.383.750.000. "Tersangka diduga melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dana kredit PD BKK Weru Sukoharjo sekarang menjadi PT BKK Jateng Persero Cabang Sukoharjo Kantor Kas Weru Tahun 2010 sampai 2011," ujarnya.

Tersangka disangka melanggar primer Pasal 2 ayat 1, subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Mam)